



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II Medan - 20143
Telepon (061) 785 2253, Faksimile (061) 785 2254
Laman dpmpptsp.pemkomedan.go.id, Pos-el dpmpptsp@pemkomedan.go.id

Nomor : 000.7.2.6/2469
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Akhir Dokumen
Renja DPMPTSP Tahun 2025

Medan, 07 Agustus 2024

Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kota Medan
di
T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Kota Medan Nomor 000.7.2.6/5416 tanggal 29 Juli 2024 perihal Penyampaian Rancangan Akhir Dokumen Renja DPMPTSP Tahun 2025, berikut terlampir disampaikan Rancangan Akhir Dokumen Renja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Demikian disampaikan, untuk proses selanjutnya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan,
Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197209041993022001



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai 2-3 Medan-20143

RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan taufik-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun. Melalui penyusunan rencana kerja ini diharapkan akan diperoleh secara jelas dan rinci gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam perubahan kelembagaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2025. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini dilakukan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DPMPTSP Kota Medan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Medan tahun 2024 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini, dapat digunakan sebagai pedoman bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya sehingga terdapat arah kebijakan dalam penyusunan program/ kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun tahun berikutnya sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan

fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Medan, 07 Agustus 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197209041993022001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Bab I. PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun Lalu	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Medan	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan DPMPTSP	28
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	29
3.3. Program dan Kegiatan	30
Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan	37
4.1. Prioritas Perangkat Daerah	37
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan	41
Bab V. Penutup	43

DAFTAR TABEL

1. Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Medan dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Medan sampai Tahun 2024.
2. Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Medan
3. Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 DPMPTSP Kota Medan.
4. Tabel T-C. 32 Usulan Musrenbang
5. Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Dalam Rangka Pencapaian Visi Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026
6. Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.
7. Tabel 4.1 Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2024.
8. Tabel 4.2 Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini merupakan wujud implementasi dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Juga tidak terlepas dari hasil evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah tahun berjalan guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah memuat program dan

kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Perumusan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui telaahan terhadap rancangan awal RKPD, usulan masyarakat, perumusan kegiatan prioritas serta penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 ini, didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;

19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2024;
21. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
23. Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renja DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025 dimaksudkan, adalah sebagai panduan/tolok ukur dalam melakukan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana kerja ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta proyeksi tahun 2026;
2. Mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*);
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Medan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA MEDAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Medan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Prioritas Perangkat Daerah
- 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP
KOTA MEDAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dan Capaian Rencana Strategi (Renstra)

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk tahun pertama dari Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021 s/d 2026 yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Terkait dengan hal tersebut pada Renja ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target pada Tahun 2025. Seiring berjalannya waktu program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Evaluasi difokuskan kepada keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impacts) kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, disertai dengan indikator kinerja pelaksanaan rencana.

Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Medan :

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Medan Dan
Pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Medan s/d Tahun 2024

Urusan Wajib
 Bidang Urusan Penanaman Modal
 DPMPTSP KOTA MEDAN

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPMPTSP) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja DPMPTSP Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMPTSP Sampai Tahun 2024	
									Target Renja DPMPTSP Tahun 2023	Realisasi Renja DPMPTSP Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18				BIDANG PENANAMAN MODAL									
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	91,00%	100%	88,76%	88,76%	100%	94%	31,47%
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	73,00%	100%	84,94%	84,94%	100%	92%	30,83%
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	73,00%	100%	87,90%	87,90%	100%	94%	30,32%
				02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi	100%	0%	100%	84,45%	84,45%	100%	92%	30,75%
2	18	01	2.02		Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	92,00%	100%	98,08%	98,08%	100%	99%	33,02%
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	100%	92,00%	100%	98,14%	98,14%	100%	99%	33,03%
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	0%	100%	90,00%	90,00%	100%	95%	31,67%

2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	100%	85,00%	100%	52,90%	52,90%	100%	76%	25,49%
2	18	01	2.05	02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	85,00%	100%	99,52%	99,52%	100%	100%	33,26%
2	18	01	2.05	09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan	100%	0%	0%	0%	0,00%	100%	100%	16,67%
2	18	01	2.05	11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	100%	0%	0%	0%	0,00%	100%	50%	16,67%
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	90,00%	100%	40,86%	40,86%	100%	70%	23,48%
				01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	85,00%	100%	19,29%	19,29%	100%	60%	19,89%
				04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Tersedianya makanan dan minuman tamu	100%	90,00%	100%	61,34%	61,34%	100%	81%	26,90%
				05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan -	100%	76,00%	100%	10,90%	10,90%	100%	55%	18,49%
				06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	100%	97,00%	100%	0,00%	0%	100%	50%	16,67%
				09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	39,50%	39,50%	100%	70%	23,25%
				10	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis yang tersedia	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	16,67%

2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	88,00%	100%	86,11%	86,11%	100%	93%	31,02%
				02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	16,67%
				05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Tersedianya Mebel	100%	100%	100%	98,96%	98,96%	100%	99%	33,17%
				10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	87,21%	87,21%	100%	94%	31,21%
				11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor Untuk Mendukung Pelayanan Perizinan Berjalan Dengan Baik	100%	100%	100%	68,96%	68,96%	100%	84%	28,17%
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	89,00%	100%	73,20%	73,20%	100%	87%	28,87%
				01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Tenaga Non ASN yang mendukung layanan jasa surat	100%	100%	100%	82,35%	82,35%	100%	91%	30,40%
				02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum	100%	89,00%	100%	53,95%	53,95%	100%	77%	25,66%
				04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	100%	88,00%	100%	94,54%	94,54%	100%	97%	32,43%
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah	100%	92,00%	100%	66,93%	66,93%	100%	83%	27,83%
				01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	85,00%	100%	61,06%	61,06%	100%	81%	26,85%

				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasioal atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Pajak dan Perizinannya	100%	100%	100%	79,78%	79,78%	100%	90%	29,97%
				05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	17%
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	100%	0%	100%	61,56%	61,56%	100%	81%	26,93%
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	33,34%
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	0%	100%	52%	52,30%	100%	76%	25,39%
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	100%	0%	100%	13,07%	13,07%	100%	57%	18,85%
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal	100%	0%	100%	13,07%	13,07%	100%	57%	18,85%
				01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	100%	0%	100%	2,11%	2,11%	100%	51%	17,02%
2	18	03	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Medan	100%	0%	100%	24,48%	24,48%	100%	62%	20,75%

				01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Medan	100%	0%	100%	24,5%	24,48%	100%	62%	20,75%
				02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah PERDA yang mendukung Iklim Usaha dan Iklim Investasi	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	33%
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Asing di Kota Medan	100%	97,00%	100%	82,25%	82,25%	100%	91%	30,38%
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	100%	97,00%	100%	82,25%	82,25%	100%	91%	30,38%
				01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Target Investasi di Kota Medan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	33%
				02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah Kota Medan	100%	97,00%	100%	82,25%	82,25%	100%	91%	30,38%
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pelayanan perizinan (% kenaikan IKM, % kesesuaian waktu pelayanan, dan % penurunan pengaduan masyarakat)	100%	83,00%	100%	2,20%	2,20%	100%	51%	17,04%
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan perizinan (% kenaikan IKM, % kesesuaian waktu pelayanan, dan % penurunan pengaduan masyarakat)	100%	83,00%	100%	2,20%	2,20%	100%	51%	17,04%
				01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinn Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan	100%	0%	100%	2,20%	2,20%	100%	51%	17,04%

				03	<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</i>	Persentase Aduan Masyarakat yang Terselesaikan	100%	83,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	33,34%
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Penanaman Modal	100%	82,00%	100%	71,24%	71,24%	100%	86%	28,55%
2	18	05	2.01		Pengedendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Realisasi Penanaman Modal (LKPM noline/PMDN)	100%	82,00%	100%	71,24%	71,24%	100%	86%	28,55%
				02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Terwujudnya Pelaku Usaha yang Ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online	100%	82,00%	100%	91,00%	91,00%	100%	96%	31,84%
				03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Terwujudnya pengawasan Pelaku Usaha	100%	82,00%	100%	40,61%	40,61%	100%	70%	23,44%
2	18	06			PROGRAM PENGELOLA DATA dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	100%	86,00%	100%	80,47%	80,47%	100%	90%	30,08%
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Medan	100%	86,00%	100%	80,47%	80,47%	100%	90%	30,08%
				01	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	86,00%	100%	80,47%	80,47%	100%	90%	30,08%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPSTP

1) Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi PMA di kota Medan pada tahun 2023 mencapai US \$.ribu 166.694.300 dari target US \$.ribu 46.604.250 tercapai sebesar 357% dan masuk dalam kategori **sangat berhasil**. Sedangkan capaian realisasi PMA tahun 2024 masih sampai pada TW I berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM adalah sebesar US\$.ribu 16.029,00 atau sekitar 32,7% dari target US\$ 48.934,46

2) Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Pencapaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN kota Medan pada tahun 2023 sebesar Rp.4.154.863.200.000 dari target Rp. 4.778.257.630.000 atau dengan capaian sebesar 86,95 % maka untuk hasil nilai realisasi PMDN masuk dalam kategori **sangat berhasil**. Sedangkan capaian realisasi PMDN tahun 2024 masih sampai pada TW I berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM adalah sebesar RP. (juta) 747.553,0 atau masih sekitar 14,9% dari target Rp. 5.017.170,52

3) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2023 sebesar 89 dari target sebesar 89 dengan capaian sebesar 100% dan masuk dalam kategori **sangat berhasil**, persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 100 persen dari target sebesar 95 persen dan masuk dalam kategori **Sangat Tinggi** dan peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan terbangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2023 dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**. Sedangkan capaian realisasi IKM tahun 2024 masih

sampai pada TW II berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM adalah 91,87 atau sekitar 103% dari target 89.

Dalam kondisi umum, pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Medan melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah urusan penanaman modal, disajikan dalam tabel T-C. 30 berikut ini.

Tabel T-C. 30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Urusan Wajib
Bidang Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal & PTSP KOTA MEDAN

NO.	Indikator	Satuan	Target IKK Tahun 2024	Target Renstra DPMPTSP Kota Medan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	48.934,46	46.604,25	48.934,46	51.381,18	53.950,24	166.694,30	16.029,2*	51.381,18	53.950,24	* Nilai Realisasi PMA tahun 2024 masih sampai TW 1 yang dikeluarkan oleh BKPM
2	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Rp (juta)	5.017.170,52	4.778.257,63	5.017.170,52	5.268.029,04	5.531.430,04	4.154.863,20	747.553,5*	5.268.029,04	5.531.430,04	* Nilai Realisasi PMDN tahun 2024 masih sampai TW 1 yang dikeluarkan oleh BKPM
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	89	89	86	89	89	91,87	86	89	* Nilai Realisasi meningkatnya kepuasan masyarakat tahun 2024 masih sampai TW 2 yang dikeluarkan oleh BKPM
	Persentase Perizinan Yang terselesaikan Dalam Waktu Tertentu	%	95	95	95	95	95	105,26	103,3	95	95	
	PeningkatanPelayaan Publik Bidang Penanaman Modal	Gedung (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang penanaman modal di Kota Medan dengan sasaran strategis meningkatnya inovasi dan ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Medan.

Sejauh ini kinerja pengelolaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal yang berkelanjutan dan diharapkan sampai pada tahun 2024 kinerja dimaksud bisa mencapai level yang lebih baik.

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi daerah saat ini, termasuk di Kota Medan adalah seringnya pemerintah (pusat) mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, perizinan, aspek-aspek terkait investasi, sehingga daerah harus segera menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi pengembangan investasi dan PTSP yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah.

Dalam upaya peningkatan investasi di daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan

pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan *stakeholder*, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan di bidang investasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengundang para investor untuk masuk ke Kota Medan.

Berbagai kegiatan rutin dan kegiatan Inovasi di bidang Pelayanan Perizinan Usaha dalam rangka sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan diantara adalah:

1. Kegiatan Jempol dan Kelingking (jemput bola dengan mobil keliling)

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/DPMPTSP/4430 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan jempol dan kelingking (jemput bola dengan mobil keliling) dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

2. Kegiatan Kamis Ceria

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/dpmptsp/4429 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan Kamis Ceria layanan perizinan usaha mikro dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha umk melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

3. Kegiatan Kios OSS Layanan Perizinan Usaha Mikro

Dasar Hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/Dpmptsp/4431 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kios Oss Layanan Perizinan Usaha Mikro Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha Umk Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Medan

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

- Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk terus mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan transparan.
- Masih terdapat beberapa perizinan yang rekomendasi teknis diperoleh dari OPD Teknis yang membidangnya, mengakibatkan layanan perizinan/non perizinan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.
- Kurangnya SDM teknis yang membidangi pelayanan perizinan secara teknis.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana tertuang dalam tabel T-C. 31, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk program/kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal Perangkat Daerah, akan tetapi kebutuhan dana program/kegiatan akan didanai dengan APBD Kota Medan. Dapat diperlihatkan pada tabel T-C. 31 berikut:

Tabel TC.3.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan

Urusan: Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Bidang Urusan: Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	BIDANG PENANAMAN MODAL					BIDANG PENANAMAN MODAL					
	Rp 36.697.841.996					Rp 36.697.841.996					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	Rp 34.515.931.196	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	Rp 34.515.931.196	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Rp 661.363.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Rp 661.363.300	-
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah dokumen penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	1 Dokumen	Rp 106.513.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah dokumen penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	1 Dokumen	Rp 106.513.300	-
02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi	6 Laporan	Rp 554.850.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	Rp 554.850.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		Rp 23.352.947.484	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		Rp 23.352.947.484	-
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	Rp 23.228.707.484	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	Rp 23.228.707.484	-
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	Rp -	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	Rp -	-
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	Rp 124.240.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	Rp 124.240.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian		Rp 172.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian		Rp 172.000.000	
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	180 paket	Rp 172.000.000	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	180 paket	Rp 172.000.000	
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan	30 orang	Rp -	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan	30 orang	Rp -	
	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase pemenuhan administrasi umum		Rp 1.281.616.668	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase pemenuhan administrasi umum		Rp 1.281.616.668	-
01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Rp 175.000.000	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Rp 175.000.000	-
04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 Bulan	Rp 766.104.568	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 Bulan	Rp 766.104.568	-
05	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan -	12 Bulan	Rp 240.512.100	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan -	12 Bulan	Rp 240.512.100	-
09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	Rp 100.000.000	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	Rp 100.000.000	-
06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	6000 Eksemplar	Rp -	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	6000 Eksemplar	Rp -	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp 3.015.107.134	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp 3.015.107.134	-
05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	Rp 200.000.000	<i>Pengadaan Mebel</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	Rp 200.000.000	-
10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	Rp 2.530.107.134	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	Rp 2.530.107.134	-
11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor Untuk Mendukung Pelayanan Perizinan Berjalan Dengan Baik	1 Tahun	Rp 285.000.000	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor Untuk Mendukung Pelayanan Perizinan Berjalan Dengan Baik	1 Tahun	Rp 285.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 4.981.836.610	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 4.981.836.610	-
01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Tenaga Non ASN yang mendukung layanan jasa surat	19 orang	Rp 998.418.020	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Tenaga Non ASN yang mendukung layanan jasa surat	19 orang	Rp 998.418.020	
02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum	12 Bln	Rp 2.400.000.000	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum	12 Bln	Rp 2.400.000.000	-
04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	5 orang	Rp 1.583.418.590	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	5 orang	Rp 1.583.418.590	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah		Rp 1.051.060.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah		Rp 1.051.060.000	-
01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Thn	Rp 80.700.000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Thn	Rp 80.700.000	-
02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Thn	Rp 379.500.000	<i>Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Thn	Rp 379.500.000	-
06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	12 Bulan	Rp 355.860.000	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	12 Bulan	Rp 355.860.000	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Thn	Rp 235.000.000	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	1 Thn	Rp 235.000.000	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase Peningkatan Investasi	100%	Rp 920.040.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase Peningkatan Investasi	100%	Rp 920.040.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal		Rp 238.140.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal		Rp 238.140.000	
	<i>Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp 238.140.000	<i>Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp 238.140.000	

	<i>Evaluasi Kinerja Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik</i>	1 Dokumen	-	<i>Evaluasi Kinerja Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik</i>	1 Dokumen	-	
	<i>Penyusunan Regulasi/Perwal Kota Medan Perizinan dan Non Perizinan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Terlaksananya Penyusunan Regulasi/Perwal Kota Medan Perizinan dan Non Perizinan</i>	1 Dokumen	-	<i>Penyusunan Regulasi/Perwal Kota Medan Perizinan dan Non Perizinan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Terlaksananya Penyusunan Regulasi/Perwal Kota Medan Perizinan dan Non Perizinan</i>	1 Dokumen	-	
	<i>Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keppada Stakeholder di Kota Medan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Terlaksananya Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keppada Stakeholder di Kota Medan</i>	1 Thn	-	<i>Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keppada Stakeholder di Kota Medan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Terlaksananya Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keppada Stakeholder di Kota Medan</i>	1 Thn	-	
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase Realisasi Penanaman Modal	100%	Rp 335.727.800	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase Realisasi Penanaman Modal	100%	Rp 335.727.800	-
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Laporan Realisasi Penanaman Modal (LKPM online/PMDN)		Rp 335.727.800	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Laporan Realisasi Penanaman Modal (LKPM online/PMDN)		Rp 335.727.800	-
02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Terwujudnya Pelaku Usaha yang Ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online</i>	-	-	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Terwujudnya Pelaku Usaha yang Ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online</i>	-	-	-
03	<i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	200 Perusahaan	Rp 197.767.800	<i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	200 Perusahaan	Rp 197.767.800	
04	<i>Pengawasan Penanaman Modal</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan serta Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha</i>	100 Kegiatan usaha	Rp 137.960.000	<i>Pengawasan Penanaman Modal</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah Perusahaan PMDN yang Diawasi</i>	100 Kegiatan	Rp 137.960.000	
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	100%	Rp 710.400.000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	100%	Rp 710.400.000	-

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegritas Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Medan		Rp 710.400.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegritas Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi pada tingkat daerah Kota Medan		Rp 710.400.000	-
01	<i>Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik yang diolah,Dikaji dan Dimanfaatkan	1 aplikasi	Rp 710.400.000	<i>Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik yang diolah,Dikaji dan Dimanfaatkan	1 aplikasi	Rp 710.400.000	-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2025 ini kami peroleh dari masukan rapat-rapat reses DPRD Kota Medan, masukan langsung dari masyarakat dan Pelaku Usaha ketika melaksanakan sosialisasi dan diseminasi pelayanan perizinan, monitoring penanaman modal, BINTEK LKPM Online, serta dari pengaduan langsung maupun online.

Dari masukan-masukan di atas kami mencoba merumuskan dan melakukan evaluasi, dimana secara umum masukannya adalah agar DPMPTSP memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dan Pelaku Usaha dalam mendapatkan pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel, dan sederajat. Begitu juga tuntutan Pelaku Usaha agar waktu penerbitan izin sesuai SOP, serta persyaratan harus jelas dan tidak berubah-ubah atau konsisten.

Usulan Program dan Kegiatan dari usulan Musrenbang pada Forum OPD untuk tahun 2025 adalah NIHIL, tertuang pada Tabel T-C. 32

Tabel T-C. 32 Usulan Musrenbang

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Permasalahan	Alamat/ Detail Lokasi	Volume Anggaran	SKPD Tujuan
	N	I	H	I	L	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA MEDAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu meningkatkan *ease of doing business* (kemudahan berusaha) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perumusan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut yang disajikan pada tabel 3.1 dibawah ini

No.	Substansi Kegiatan	Diakomodir dalam Renja DPMPTSP Tahun 2024
	<i>Urusan Wajib Penanaman Modal</i>	
1.	Penyelenggaraan Aplikasi Perizinan Terpadu Melayani Secara Terdepan (SIPANDU)	√
2.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dengan sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>)	√
3.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dengan OSS, menyediakan; a. Pelayanan Mandiri; b. Pelayanan Berbantuan; dan c. Pelayanan Strategis.	√
4.	<i>Standar Operating Prosedure</i> (SOP) Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha	√
5.	<i>Standar Operating Prosedure</i> (SOP) Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha	√

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Medan

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mengacu pada Misi ke 6 yaitu MEDAN INOVATIF dengan tujuan Renstra “ Menciptakan Kota Medan menjadi Kota Kreatif dan Inovatif yang berlandaskan kepada penguatan modal manusia, teknologi digital dan sosial budaya. Sasaran renstra yaitu meningkatnya inovasi dan ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Medan. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

No.	Misi (RPJMD)	Tujuan (RPJMD)	Indikator Tujuan (RPJMD)	Sasaran (RPJMD) Indikator Sasaran (RPJMD)	Inikator Sasaran (RPJMD)	Tujuan Renstra)	Indikator Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran (Renstra)
1.	Medan Inovatif	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi dan Meningkatnya PAD	Pertumbuhan Investasi dan Rasio PAD	Pertumbuhan Investasi di Kota Medan	Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Realisasi Investasi
								Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
								Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Medan, tepatnya pada misi keenam yaitu “*MEDAN INOVATIF*” dengan tujuan Renstra Menciptakan Kota Medan menjadi Kota Kreatif dan Inovatif yang berlandaskan kepada penguatan modal manusia, teknologi digital dan sosial budaya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan perlu melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 yang disajikan pada tabel T-C. 33 berikut :

T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Urusan Wajib
Bidang Urusan Penanaman Modal
DPMPTSP KOTA MEDAN

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				36.697.841.996				38.420.895.131
2	18				BIDANG PENANAMAN MODAL				36.697.841.996				38.420.895.131
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	DPMPTSP Kota Medan	100%	34.515.931.196	APBD Kota Medan	-	100%	36.129.888.791
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			661.363.300	APBD Kota Medan		100%	582.592.500
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kota Medan	1 Dokumen	106.513.300	APBD Kota Medan	-	1 Dokumen	111.838.965
				02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi	DPMPTSP Kota Medan	2 Dokumen	554.850.000	APBD Kota Medan	-	2 Dokumen	582.592.500
2	18	01	2.02		Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi			23.352.947.484	APBD Kota Medan		100%	24.520.594.858
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kota Medan	12 Bulan	23.228.707.484	APBD Kota Medan	-	12 Bulan	24.390.142.858
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP Kota Medan	1 Laporan	-	APBD Kota Medan	-	1 Laporan	-
				02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP Kota Medan	1 Laporan	124.240.000	APBD Kota Medan	-	1 Laporan	130.452.000

2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian			172.000.000	APBD Kota Medan		100%	180.600.000
2	18	01	2.05	02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	DPMPTSP Kota Medan	210 orang	172.000.000	APBD Kota Medan	-	210 orang	180.600.000
2	18	01	2.05	09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan	DPMPTSP Kota Medan	30 orang	-	APBD Kota Medan	-	30 orang	-
2	18	01	2.05	11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	DPMPTSP Kota Medan	157 orang	-	APBD Kota Medan	-	157 orang	-
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum			1.281.616.668	APBD Kota Medan		100%	1.345.697.501
				01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kota Medan	12 Bulan	175.000.000	APBD Kota Medan	-	1 Tahun	183.750.000
				04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Tersedianya makanan dan minuman tamu	DPMPTSP Kota Medan	13 Bulan	766.104.568	APBD Kota Medan	-	1 Tahun	804.409.796
				05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan -	DPMPTSP Kota Medan	14 Bulan	240.512.100	APBD Kota Medan	-	4 Triwulan	252.537.705
				06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	DPMPTSP Kota Medan	6000 Eksemplar	-	APBD Kota Medan	-	6000 Eksemplar	-
				09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kota Medan	1 Dokumen	100.000.000	APBD Kota Medan	-	1 Dokumen	105.000.000
				10	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis yang tersedia	DPMPTSP Kota Medan	1 Laporan	-	APBD Kota Medan	-	1 Laporan	-

2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			3.015.107.134	APBD Kota Medan		100%	3.165.862.491
				02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional atau	DPMPTSP Kota Medan	Unit/jenis	-	APBD Kota Medan	-	Unit/jenis	-
				05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Tersedianya Mebel	DPMPTSP Kota Medan	1 Tahun	200.000.000	APBD Kota Medan	-	1 Tahun	210.000.000
				10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP Kota Medan	1 Tahun	2.530.107.134	APBD Kota Medan	-	1 Tahun	2.656.612.491
				11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor Untuk Mendukung Pelayanan Perizinan Berjalan Dengan Baik	DPMPTSP Kota Medan	1 Tahun	285.000.000	APBD Kota Medan	-	1 Tahun	299.250.000
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.981.836.610	APBD Kota Medan	-	100%	5.230.928.441
				01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Tenaga Non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyurat	DPMPTSP Kota Medan	19 orang	998.418.020	APBD Kota Medan	-	19 orang	1.048.338.921
				02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum	DPMPTSP Kota Medan	12 Bulan	2.400.000.000	APBD Kota Medan	-	12 Bulan	2.520.000.000
				04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	DPMPTSP Kota Medan	5 orang	1.583.418.590	APBD Kota Medan	-	5 orang	1.662.589.520
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah			1.051.060.000	APBD Kota Medan		100%	1.103.613.000
				01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	DPMPTSP Kota Medan	1 Thn	80.700.000	APBD Kota Medan	-	1 Thn	84.735.000

				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPSTSP Kota Medan	1 Thn	379.500.000	APBD Kota Medan	-	1 Thn	398.475.000
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	DPMPSTSP Kota Medan	12 Bulan	355.860.000	APBD Kota Medan	-	12 Bulan	373.653.000
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	DPMPSTSP Kota Medan	1 Thn	235.000.000	APBD Kota Medan	-	1 Thn	246.750.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	DPMPSTSP Kota Medan	100%	920.040.000	APBD Kota Medan	-	100%	966.042.000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal			238.140.000	APBD Kota Medan	-	100%	250.047.000
				01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPSTSP Kota Medan	1 Dokumen	238.140.000	APBD Kota Medan	-	1 Dokumen	250.047.000
				02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	DPMPSTSP Kota Medan	Kegiatan	-	APBD Kota Medan	-	Kegiatan	-
2	18	03	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Medan			681.900.000	APBD Kota Medan	-	100%	715.995.000
				04	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Medan	DPMPSTSP Kota Medan	1 Dokumen	681.900.000	DPMPSTSP Kota Medan		1 Dokumen	715.995.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Asing di Kota Medan	DPMPSTSP Kota Medan	100%	186.410.000	APBD Kota Medan	-	100%	195.730.500
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal			186.410.000	APBD Kota Medan		100%	195.730.500

2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Asing di Kota Medan	DPMPTSP Kota Medan	100%	186.410.000	APBD Kota Medan	-	100%	195.730.500
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal			186.410.000	APBD Kota Medan		100%	195.730.500
				01	<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Target Investasi di Kota Medan</i>	DPMPTSP Kota Medan	2 Media	-	APBD Kota Medan		2 Media	-
				02	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah Kota Medan	DPMPTSP Kota Medan	1 0 Promosi	186.410.000	APBD Kota Medan	-	1 0 Promosi	195.730.500
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPMPTSP Kota Medan	100%	29.333.000	APBD Kota Medan	-	100%	30.799.650
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan			29.333.000	APBD Kota Medan	-	100%	30.799.650
				01	<i>Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinn Berusaha Berdasarkan Resiko Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berdasarkan Resiko terintegrasi Secara Elektronik</i>	DPMPTSP Kota Medan	15.000 Izin	29.333.000		-	15.000 Izin	30.799.650
				02	<i>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</i>	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP Kota Medan	150 Perusahaan	-	APBD Kota Medan	-	100%	-

				03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP Kota Medan	100%	-	APBD Kota Medan	-	1 Dokumen	-
				04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP Kota Medan	50 Perusahaan	-	APBD Kota Medan	-	1 Dokumen	-
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Penanaman Modal	DPMPTSP Kota Medan	100%	335.727.800	APBD Kota Medan	-	100%	352.514.190
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Realisasi Penanaman Modal (LKPM noline/PMDN)			335.727.800	APBD Kota Medan	-	100%	352.514.190
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terwujudnya Pelaku Usaha yang Ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online	DPMPTSP Kota Medan	200 Perusahaan / koperasi	-	APBD Kota Medan	-	200 Perusahaan / koperasi	-
					Bimbingan teknis penyusunan LKPM online	Terlaksananya Bimbingan teknis penyusunan LKPM online	DPMPTSP Kota Medan	1 Thn	197.767.800	APBD Kota Medan	-	1 Thn	207.656.190
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN yang Diawasi	DPMPTSP Kota Medan	200 Perusaha	137.960.000	APBD Kota Medan	-	220 Perusaha	144.858.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLA DATA dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	DPMPTSP Kota Medan	100%	710.400.000	APBD Kota Medan	-	100%	745.920.000
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Medan			710.400.000	APBD Kota Medan	-	100%	745.920.000
				01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP Kota Medan	1 Aplikasi	710.400.000	APBD Kota Medan	-	1 Aplikasi	745.920.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA MEDAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Medan tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud DPMPTSP berperan dalam melakukan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan pada kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)		Sumber Dana
		Usulan	Perubahan	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	38.259.023.123	28.240.237.644	APBD
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	32.084.812.373	26.202.370.944	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.594.240	94.144.240	APBD
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	101.594.240	94.144.240	APBD
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	APBD
2.	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	21.625.342.584	21.625.342.584	APBD
2.1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	21.491.402.584	21.491.402.584	APBD
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	
2.2	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	133.940.000	133,940,000	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	0	0	APBD
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya	0	0	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.132.075.861	445.893.386	APBD
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000	70.739.426	APBD
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	982.075.861	375.153.960	APBD
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	APBD
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	754.268.550	251.000.000	APBD
5.1	Pengadaan Mebel	350.000.000	187.000.000	APBD
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	0	0	APBD
5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	404.268.550	64.000.000	APBD

6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.854.360.560	3.387.722.434	APBD
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	998.418.020	998.418.020	APBD
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.400.000.000	1.223.100.574	APBD
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.455.972.540	1.166.203.840	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.053.095.000	324.268.300	APBD
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.200.000	58.200.000	APBD
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.600.000	147.950.000	APBD
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	426.795.000	43.920.000	APBD
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	237.500.000	74.198.300	APBD
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.902.806.700	631.386.700	APBD
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	422.370.000	238.140.000	APBD
1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	422.370.000	238.140.000	APBD
2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1.480.436.700	393.246.700	APBD
2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1.480.436.700	393.246.700	APBD
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.921.310.050	292.000.000.00	APBD
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	1.921.310.050	292.000.000.00	APBD
1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.921.310.050	292.000.000	APBD

IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	322.285.000	59.833.000	APBD
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	322.285.000	59.833.000	APBD
1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinn Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	322.285.000	59.833.000	APBD
V.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	770.129.000	301.047.000	APBD
1.	Pengedendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	770.129.000	301.047.000	APBD
1.1	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	632.169.000	194.607.000	APBD
1.2	Pengawasan Penanaman Modal	137.960.000	106.440.000	APBD
IV.	PROGRAM PENGELOLA DATA dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.257.680.000	753.600.000	APBD
1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.257.680.000	753.600.000	APBD
1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.257.680.000	753.600.000	APBD

4.2 Prioritas Perangkat Daerah dan Pendanaan

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.
Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Keterangan
Meningkatnya realisasi Investasi	100%	Kota Medan	2.18.02	Program Iklim Penanaman Modal	920.040.000	
			2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	238.140.000	Dokumen
			2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Invstasi Kabupaten/Kota	681.900.000	
			2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	186.410.000	
			2.18.03.2.01	Penyelenggraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	186.410.000	5 Dokumen
			2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	29.333.000	

			2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.333.000	100 pelaku usaha
			2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Modal	335.727.800	
			2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	335.727.800	
			2.18.05.2.01.005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	197.767.800	200 Pelaku Usaha
			2.18.05.2.01.006	Pengawasan Penanaman Modal	137.960.000	100 Kegiatan
			2.18.06	Program Pengelola Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan		
			2.18.06.2.01.0002	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	710.400.000	1 Dokumen

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah serta berfungsi untuk menilik kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2025 tersebut telah sesuai dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan maupun Rencana Strategis DPMPTSP Kota Medan (Renstra) yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pencapaian visi dan misi Kota Medan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini beberapa hal mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga kami sangat mengharapkan masukan dan saran guna penyempurnaan penyusunan buku ini dan dapat bermanfaat serta dapat dipergunakan dimasa akan datang.

Medan, 07 Agustus 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197209041993022001